



MINISTRY OF TRADE
REPUBLIC OF INDONESIA

RENCANA KERJA

BIRO PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PBK, SRG, DAN PLK 2026

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI**



MINISTRY OF TRADE
REPUBLIC OF INDONESIA



www.bappebti.go.id



[@bappebti](https://www.instagram.com/bappebti)



[Bappebti Kementerian Perdagangan](https://www.facebook.com/Bappebti.Kementerian.Perdagangan)



[infobappebti](https://twitter.com/infobappebti)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Rencana Kinerja Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) Bappebti Tahun Anggaran 2026 telah selesai.

Rencana kinerja ini disusun sebagai bentuk komitmen Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) untuk melaksanakan Program kerja pada Tahun Anggaran 2026. Agar pelaksanaan Program kerja dapat dinilai dan diukur dengan baik, maka perlu dibuat target-target pengukuran kinerja secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga memudahkan untuk melakukan evaluasi kinerjanya. Dalam Rencana Kinerja Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan target-target untuk sasaran makro dalam Tahun Anggaran 2026 serta indikator kinerja untuk input, output dan outcome yang diambil dari RKA-KL/DIPA Bappebti Tahun Anggaran 2026.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) Tahun Anggaran 2026, semoga pelaksanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2026 dimaksud berjalan sesuai rencana dan tidak ada hambatan.

Akhir kata, semoga Rencana Kinerja Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) ini dapat bermanfaat dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) pada khususnya dan Bappebti pada umumnya.

Jakarta, Desember 2025

**Kepala Biro Pengawasan dan
Penindakan PBK,SRG dan PLK,**



MATHEUS HENDRO PURNOMO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Ruang Lingkup	3
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	4
A. Capaian Kinerja Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG, dan PLK Tahun 2024	4
B. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024	9
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2026	11
A. Visi dan Misi	11
B. Program, Kegiatan, Tujuan dan Sasaran Kegiatan	11
C. Indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output dan Klasifikasi Rincian Output	12
BAB IV PENUTUP	19
LAMPIRAN	
- Form Rencana Kerja	
- Form RK Tahun 2026	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah kegiatan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan penyelesaian di kemudian hari berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Komoditi mencakup seluruh barang, jasa, hak, kepentingan serta derivatifnya yang dapat diperdagangkan melalui instrumen tersebut.

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan kegiatan yang meliputi penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang.

Sementara itu, Pasar Lelang Komoditas (PLK) adalah pasar fisik terorganisasi bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan fisik komoditas.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan terhadap PBK, SRG, dan PLK. Seiring dengan perkembangan ketiga instrument tersebut, Bappebti dituntut untuk meningkatkan kualitas agar dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional, khususnya bagi sarana lindung nilai, pembentukan harga transparan, alternatif, investasi, serta penciptaan lapangan kerja.

Dalam mendukung tugas tersebut, Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG, dan PLK bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakandi bidang pengawasan dan penindakan. Pengawasan yang efektif menjadi semakin penting mengingat peningkatan jumlah pelaku usaha dan kompleksitas transaksi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis melalui kegiatan-kegiatan yang terukur guna memastikan pelaksanaan PBK, SRG, dan PLK berlangsung secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- B. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG, dan PLK**
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, tugas pokok dari Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG, dan PLK adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan preventif dan represif di bidang pengawasan dan penindakan PBK, SRG, dan PLK;
 - b. Penyiapan pelaksanaan pengawasan preventif di bidang PBK, SRG, dan PLK;
 - c. Penyiapan pelaksanaan pengawasan represif dalam hal pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi;
 - d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penindakan; dan
 - e. Pelaksanaan identifikasi, pemeriksaan, penyidikan terhadap tindakan praktik PBK yang dilarang, praktik ilegal, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

C. Ruang Lingkup

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG, dan PLK Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/08/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Ruang lingkup dokumen ini meliputi:

- Bab I. Pendahuluan (latar belakang, tugas pokok dan fungsi, ruang lingkup);
- Bab II. Capaian Kinerja Tahun 2024;
- Bab III. Rencana Kerja Tahun 2026 (visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, program, dan kegiatan);
- Bab IV. Penutup.

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

- A. Capaian Kinerja Biro Pengawasan PBK, SRG, dan PLK Tahun 2024** Sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/08/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perdagangan, Biro telah menetapkan lima Indikator Kinerja (IK) tahun 2024 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Bappebti tahun 2025-2029.

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Biro Pengawasan PBK, SRG, dan PLK Tahun 2024

No	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
1	Persentase pelaku usaha PBK yang patuh dalam Pelaksanaan Transaksi	97%	99%	102%
2	Persentase pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT	97%	96%	99%
3	Persentase pelaku usaha PBK yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	97%	100%	103%
4	Persentase Pelaku Usaha Aset Kripto Yang Patuh	97%	94%	97%
5	Persentase Pelaku Usaha Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Yang Patuh	97%	91%	94%
Rata-rata capaian				99%

Sumber Data: Biro Pengawasan PBK, SRG dan PLK, 2024

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata nilai capaian Indikator Kinerja Biro Pengawasan PBK, SRG, dan PLK tahun 2024 sebesar **99%**.

Rumus yang digunakan untuk mengukur ketiga Indikator Biro Pengawasan PBK, SRG, dan PLK adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun penjelasan lebih rinci dari masing-masing Indikator Kinerja Biro Pengawasan PBK, SRG, dan PLK adalah sebagai berikut:

IK - 1, Persentase Pelaku Usaha PBK yang Patuh dalam Pelaksanaan Transaksinya

Pada tahun 2024, Persentase Pelaku Usaha PBK yang Patuh dalam Transaksinya menargetkan sebanyak 97%, dimana realisasi pada tahun 2024 adalah 99% dengan capaian sebesar 102%.

Indikator Kinerja ini juga didukung oleh 3 (tiga) kegiatan lainnya yaitu Pengawasan Transaksi PBK, Pengelolaan Data Pengawasan Transaksi PBK, dan Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA.

IK – 2, Persentase Pelaku Usaha PBK yang Patuh dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT

Indikator Kinerja yang ditargetkan untuk IK-2 sebanyak 97% dan untuk realisasinya mencapai 96% atau memberikan capaian sebesar 99% terhadap kinerja Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG, dan PLK.

Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Pelaku Usaha PBK yang Patuh dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT berdasarkan pada capaian **kepatuhan pialang berjangka, terdiri dari penilaian kepatuhan atas kewajiban pelaporan serta integritas keuangan Pialang Berjangka dan Penyelenggara SPA, meliputi :**

Tabel 2.

Aspek Penilaian Kepatuhan Pialang Berjangka

No	Aspek Penilaian
A.	Pemenuhan Nilai Modal Disetor
B.	Pemenuhan Nilai Ekuitas
C.	Pemenuhan Modal Bersih Disesuaikan
D.	Pemenuhan Penempatan Margin di LKB
E.	Ketepatan Penyampaian Laporan Kegiatan Bulanan DK dan APU PPT
F.	Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Harian
G.	Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan

Tata cara penghitungan nilai Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT, sebagai berikut:

1. Penilaian Kepatuhan Pialang Berjangka:

$$X = \frac{A+B+C+D+E+F+G}{7}$$

***) Keterangan :**

X = Jumlah Pialang Berjangka yang patuh dalam kegiatan operasional, keuangan dan APU PPT rata-rata per bulan

A = Jumlah Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban persyaratan nilai modal disetor

B = Jumlah Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban nilai ekuitas

C = Jumlah Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban nilai Modal Bersih Disesuaikan

D = Jumlah Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban Penempatan Margin di Lembaga Kliring Berjangka

E = Jumlah Pialang Berjangka yang telah menyampaikan Laporan Bulanan Direktur Kepatuhan secara tepat waktu

F = Jumlah Pialang Berjangka yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Harian, secara tepat waktu-

G = Jumlah Pialang Berjangka yang telah menyampaikan Laporan Keuangan, Bulanan, secara tepat waktu

2. Penilaian Kepatuhan Pedagang Penyelenggara SPA

Tabel 3.

Aspek Penilaian Kepatuhan Pedagang Penyelenggara SPA

No	Aspek Penilaian
H.	Pemenuhan Nilai Modal Disetor
I.	Pemenuhan Nilai Ekuitas
J.	Pemenuhan Penempatan Margin di LKB
K.	Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan

$$Y = \frac{H+I+J+K}{4}$$

Keterangan :

Y =Jumlah Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang patuh dalam kegiatan operasional dan keuangan rata-rata per bulan.

H =Jumlah Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang memenuhi kewajiban persyaratan nilai modal disetor.

I = Jumlah Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang memenuhi kewajiban nilai ekuitas

J = Jumlah Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang memenuhi kewajiban Penempatan Margin di Lembaga Kliring Berjangka

K =Jumlah Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan, secara tepat waktu.

Dari penilaian kepatuhan kedua pelaku usaha tersebut (Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara SPA), diperoleh formula perhitungan sebagai berikut:

Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT (Z):

$$Z = X + Y$$

Z = Rata–Rata Nilai Kepatuhan Pialang Berjangka (X) + Rata-Rata Nilai Kepatuhan Pedagang Penyelenggara SPA (Y)

Indikator Kinerja ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan pendukung lainnya yaitu: Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK terdiri dari Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK dan Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK, Pengawasan Kepatuhan Pelaporan dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK, Pengawasan APU PPT Pelaku Usaha PBK terdiri dari Pengawasan Kegiatan Pelaku Usaha Program APU PPT.

IK - 3, Persentase Pelaku Usaha PBK yang Telah Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil audit

Indikator Kinerja yang ditargetkan untuk IK-3 sebanyak 97% dan untuk realisasinya berhasil mencapai 100% perusahaan atau berhasil memberikan capaian sebesar 103% terhadap kinerja Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG, dan PLK.

Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah pelaku usaha PBK yang diaudit didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Audit Pelaku Usaha PBK dan Monitoring Tindaklanjut hasil audit.

IK - 4, Persentase Jumlah Pelaku Usaha Aset Kripto yang Patuh

Indikator Kinerja yang ditargetkan untuk IK-4 sebanyak 97% dan untuk realisasinya berhasil mencapai 94% perusahaan atau berhasil memberikan capaian sebesar 96% terhadap kinerja Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG, dan PLK.

Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah pelaku usaha PBK yang terdiri dari Kepatuhan Pelaku Usaha dalam penyampaian Laporan Transaksi dan Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Penyampaian Laporan Keuangan.

IK - 5, Persentase Lembaga SRG dan PLK yang Patuh dalam Kegiatan Operasional

Indikator Kinerja yang ditargetkan untuk IK-5 sebanyak 97% dan untuk realisasinya berhasil mencapai 91% perusahaan atau berhasil memberikan capaian sebesar 94% terhadap kinerja Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG, dan PLK.

B. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024

Anggaran Biro Pengawasan PBK, SRG dan PLK yang digunakan untuk pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.377.000.000,00.

Tabel 4.
Anggaran Biro Pengawasan PBK, SRG dan PLK
Periode Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Alokasi Anggaran	Pagu Revisi
1.	2020	Rp5.200.000.000,-	Rp2.683.600.000,-
2.	2021	Rp3.042.960.000,-	Rp1.360.632.893,-
3.	2022	Rp2.119.618.000,-	Rp1,483,332,000,-
4.	2023	Rp3.677.738.000,-	Rp3.124.032.000,-
5.	2024	Rp3.377.000.000,-	Rp2.741.724.000,-

Sumber Data: Biro Pengawasan PBK, SRG dan PLK, 2024

Rincian realisasi anggaran Biro Pengawasan PBK, SRG dan PLK pada tahun 2024 berdasarkan sasaran dan masing-masing Indikator Kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.
Realisasi Anggaran Biro Pengawasan PBK, SRG, dan PLK
Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan		Pagu Revisi	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Pelaku Usaha PBK yang Patuh Dalam Pelaksanaan Transaksi	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Pelaku Usaha PBK yang Diawasi Secara Onsite Terkait Transaksi	Rp319,589,000	Rp319,589,000	100%
		Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pendukung Pengawasan Transaksi PBK yang Termutakhirkan	Rp100.000.000	Rp99,761,250	99,76%
			Pengembangan Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA	Rp50,000,000	Rp49,950,000	99,90%

No.	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan		Pagu Revisi	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
2.	Persentase pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan dan APU PPT	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Pengawasan Kepatuhan APU PPT Pelaku Usaha PBK	Rp117,569,000	Rp117,477,320	99,92%
			Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK	Rp228,530,000	Rp224,374,000	98,18 %
			Pengawasan Kepatuhan Pelaporan dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK	Rp256,527,000	Rp256,034,735	99,81%
		Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pendukung Pengawasan Direktur Kepatuhan Dan Verifikasi Laporan Keuangan PBK yang Termutakhirkan	Rp262.000.000	Rp199.866.600	99.93%
			Pengawasan Kepatuhan Pelaporan dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK	Rp256,527,000	Rp256,034,735	99,81%
3.	Persentase Pelaku Usaha PBK yang Telah Menindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Audit	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Pelaku Usaha PBK yang Diaudit	Rp429,337,000	Rp428,336,439	99,77%
4	Persentase Pelaku Usaha Aset Kripto Yang Patuh	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	-	-	-	-
5	Persentase Pelaku Usaha Sistem Resi Gudang dan Pasar	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Lembaga dan Transaksi SRG yang diawasi	Rp361.496 .000	Rp361.496.000	99,79%
			Mekanisasi Sistem Pengawasan pada Gudang CCTV	Rp290.000.000	Rp289.799.276	99,93%

	Lelang Komoditas Yang Patuh		Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang diawasi	Rp166.677.000	Rp165.868.799	99,52%
		Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Penunjang Pengawasan SRG dan PLK dalam pemeliharaan	Rp150.000.000	Rp149.711.250	99,81%

Sumber Data: Biro Pengawasan PBK, SRG, dan PLK, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa pencapaian realisasi anggaran kelima indikator pada tahun 2024 mencapai 98,63%. Biro Pengawasan PBK, SRG, dan PLK masih mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan proses pencairan anggaran, yaitu adanya kegiatan yang dilaksanakan bersamaan waktunya dengan kegiatan pada Biro lain sehingga seringkali pegawai/pimpinan yang diundang dalam suatu kegiatan tersebut tidak dapat hadir dalam acara dimaksud. Untuk menyelesaikan kendala di atas, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki di tahun berikutnya antara lain:

- Terdapat kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai rencana karena adanya penyesuaian jadwal antara kegiatan satu dengan kegiatan lainnya sebagai akibat dari adanya optimalisasi anggaran;
- Terhambatnya pelaksanaan pengawasan/audit secara *onsite* ke pelaku usaha PBK karena keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud.

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2026

A. Visi dan Misi

Visi	Sesuai dengan Perencanaan Strategis (Renstra) Bappebti yang telah disusun dengan mengacu pada Visi Presiden Tahun 2025-2029, yaitu ” Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas yang Maju dan Berkelanjutan dalam Rangka Mewujudkan Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi dengan Rantai Pasar Domestik dan Global ”.
Misi	Untuk dapat mewujudkan visi di atas, maka Kementerian Perdagangan memiliki tujuan yaitu:“Terwujudnya nilai tambah PBK, SRG dan PLK dalam mendukung peningkatan keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri, Terwujudnya peningkatan kontribusi PBK, SRG, PLK terhadap perdagangan Domestik, dan Terwujudnya kapasitas kelembagaan Bappebti yang efektif dan efisien”, dengan sasaran strategis yang salah satunya terkait dengan tugas dan fungsi Bappebti yaitu “ Meningkatkan kinerja PBK, SRG, PLK yang tangguh dan berkelanjutan pada periode 2025-2029 dan Memperkuat kapasitas kelembagaan Bappebti yang efektif dan efisien.pada periode 2025-2029 ”

B. Program, Kegiatan, Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Program	Dalam mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Perdagangan maka pelaksanaan program Bappebti adalah “ Perdagangan Dalam Negeri ”.
Kegiatan	Dalam pelaksanaan program kerja Bappebti TA. 2026, telah disusun beberapa aktivitas Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG, dan PLK yang telah tercantum dalam Pagu Indikatif Bappebti TA. 2026 dalam kegiatan “ Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas ”.

Tujuan	Tujuan yang hendak dicapai pada kegiatan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas adalah “Meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)” .
Sasaran Kegiatan	Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, Biro Pengawasan PBK, SRG, dan PLK berkontribusi dalam pencapaian sasaran : “Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Penindakan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)” .

C. Indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan Klasifikasi Rincian Output

Sasaran Kegiatan (output) Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG, dan PLK Bappebti Tahun 2026 terdiri dari 2 indikator kinerja kegiatan.

Dalam mencapai Sasaran Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG, dan PLK, maka ditetapkan Indikator Sasaran sebagai berikut:

1. Pelaku usaha yang patuh dalam kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) dengan target sebanyak 83%;
2. Persentase penanganan pelanggaran ketentuan di Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) dengan target sebanyak 77%;

Untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di atas, dilakukan pengelompokan Rincian Output ke dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) untuk menghindari kegiatan yang tumpang tindih. Pada tahun 2026 terdapat beberapa KRO di Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG, dan PLK Bappebti, yaitu :

Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha

A. Pengawasan Pelaku Usaha PBK melalui Audit

Sesuai dengan Peraturan Kepala Bappebti No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeriksaan Teknis dalam Rangka Audit di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, terdapat 2 (dua) jenis audit, yaitu:

- Audit Rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan secara rutin atas pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sesuai jadwal yang tertuang dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).
- Audit sewaktu-waktu adalah pemeriksaan yang dilakukan secara sewaktu-waktu atau dalam tujuan tertentu atas pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka di luar yang sudah ditetapkan dalam PKAT.

Metode Pelaksanaan Audit Pelaku Usaha PBK melalui pemeriksaan teknis terhadap ruang lingkup yang berbeda-beda didasarkan pada penggolongan *auditee* sebagai Pelaku Usaha PBK, seperti Pialang Berjangka, Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, Bursa

Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, serta dari maksud atau jenis auditnya yaitu Audit Rutin atau Audit Sewaktu-waktu atau dengan tujuan tertentu/khusus. Ruang lingkup pemeriksaan Audit Rutin antara lain: Manajemen dan Organisasi; Pelaporan dan Pembukuan; Penerimaan Nasabah; Pelaksanaan Transaksi; Integritas Keuangan; Pengelolaan Dana Nasabah, dan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

B. Pengawasan Pelaku Usaha SRG

1) Pelaksanaan Pengawasan Lembaga dan Transaksi SRG

Kegiatan Ruang lingkup pengawasan SRG adalah pengawasan kepada Gudang dan Pengelola Gudang SRG, Lembaga Penilai Kesesuaian, dan Pusat Registrasi SRG. Adapun aspek pengawasan Gudang dan Pengelola Gudang SRG terbagi atas 2 (dua) aspek pengawasan yaitu Pengawasan Teknis Pengelola Gudang SRG (Pemantauan Laporan Periodik/Berkala dan Pemeriksaan Teknis Lapangan) dan Pengawasan Teknis Transaksi SRG yang meliputi Pemantauan CCTV dan Pengawasan Transaksi serta Pemantauan SSRG.

Kegiatan Pengawasan Lembaga SRG dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kondisi gudang, barang dan kantor Pengelola Gudang. Pemeriksaan Teknis Lapangan dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Bappebti. Pemeriksaan Teknis Lapangan terbagi atas Pemeriksaan Resi Gudang, Pemeriksaan Gudang, Pemeriksaan Barang, Pemeriksaan Pengelola Gudang, dan Pemeriksaan Catatan Keuangan.

Dikarenakan adanya keterbatasan anggaran di tahun 2026, maka pemantauan CCTV tidak dilaksanakan. Biro mengambil langkah berupa strategi mitigasi, di mana pada tahun 2026 pengawasan SRG dan PLK akan difokuskan pada pendekatan *offsite* berbasis teknologi, termasuk verifikasi laporan berkala dan koordinasi *virtual*, guna menjaga efisiensi tanpa mengorbankan cakupan pengawasan.

C. Pengawasan Pelaku Usaha Legal/Ilegal melalui penindakan di Bidang PBK, SRG, dan PLK

Penegakan Hukum di bidang PBK, SRG dan PLK, khususnya di PBK di bagi menjadi 2 (dua) jenis kegiatan yaitu penegakan hukum terhadap Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Entitas Ilegal (para pihak yang melakukan kegiatan di bidang perdagangan berjangka komoditi tanpa memiliki izin usaha dari Bappebti dan/atau melakukan kegiatan berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia).

Dalam melakukan Penegakan Hukum di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG dan PLK, Bappebti melakukan kegiatan diantaranya Identifikasi Lapangan/*Undercover*, Pemeriksaan, Gelar Kasus, Penyidikan dan secara aktif berpartisipasi dalam forum dan/atau rapat yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penanganan kegiatan ilegal di bidang PBK.

Kegiatan Identifikasi Lapangan/*Undercover* dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup melalui aktivitas penyamaran ke dalam aktivitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau entitas ilegal guna mengetahui parameter atau unsur pelanggaran hukum yang dilakukan, seperti bisnis proses perusahaan, para pihak yang terlibat, lokasi/alamat entitas, bentuk promosi, mekanisme pemasaran serta informasi lainnya yang dianggap perlu oleh Tim Penindakan, Biro Pengawasan dan Penindakan, Bappebti untuk mendukung/memperkuat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau entitas ilegal tersebut.

Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran maupun entitas ilegal yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PLK berdasarkan pengolahan hasil identifikasi lapangan/*undercover* selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan. Kewenangan Pemeriksaan terhadap para

pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang PBK, SRG dan PLK diberikan kepada Bappebti sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undang di bidang PBK, SRG dan PLK yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau entitas tertentu.

Selain berdasarkan tindaklanjut hasil Identifikasi lapangan/undercover, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PLK;
- b. Tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang perizinan di bidang PBK dan SRG; dan/atau
- c. Terdapat petunjuk tentang terjadinya perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang PBK dan SRG.

Hasil pemeriksaan terhadap pelaku usaha PBK, SRG dan PLK dan Entitas ilegal yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undang di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, selanjutnya akan dilakukan pemaparan oleh Tim Pemeriksa melalui kegiatan Gelar Kasus.

Gelar Kasus merupakan suatu rapat forum pembahasan kasus/perkara yang sedang ditangani oleh Pemeriksa Bappebti/Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bappebti. Gelar Kasus bertujuan untuk melakukan evaluasi hasil pemeriksaan, menentukan arah atau langkah hukum selanjutnya atas kasus/perakara sampai dengan menentukan layak atau tidaknya suatu kasus/perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya, seperti contoh rekomendasi pengenaan sanksi administratif maupun

peningkatan kasus menjadi penyidikan. Peserta rapat gelar kasus umumnya terdiri dari Pejabat Eselon I dan II lingkup Bappebti, Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri, Tim Pemeriksa, Narasumber/Ahli serta pihak lain yang dianggap perlu dan berkaitan dengan pembahasan kasus/perkara. Namun, pada tahun 2026 Kegiatan Gelar Kasus tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran.

Selain melakukan pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 68 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Bappebti berwenang untuk melakukan penyidikan terkait tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas. Penyidikan tersebut melibatkan PPNS Bappebti dan berkoordinasi dengan Korwas PPNS, Mabes Polri.

BAB IV

PENUTUP

Penutup

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun 2024, tantangan pengawasan, serta keterbatasan anggaran. Meskipun terjadi penyesuaian target, Biro tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Indikator Sasaran Kegiatan Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG, dan PLK TA. 2026 adalah :

- a. Persentase Pelaku Usaha yang Patuh dalam Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas sebesar 83%;
- b. Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas sebesar 77%.

Jika dilihat, Pagu Anggaran TA. 2026 sebesar Rp625.000.000,00 mengalami penurunan sebesar 83% dari pagu anggaran tahun 2024. Untuk langkah selanjutnya, Biro akan memprioritaskan pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi (*offsite monitoring*), serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan efektivitas pengawasan dan penindakan.

LAMPIRAN 1A

FORMULIR

RENCANA KERJA

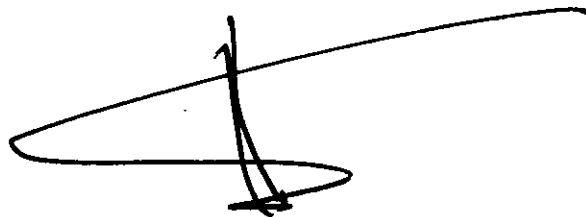
ROWASDAK PBK,SRG DAN

PLK TAHUN 2026

**FORMULIR RENCANA KERJA
BIRO PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PBK, SRG DAN PLK
TAHUN 2026**

SASARAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN TARGET
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan dan Penindakan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Pelaku Usaha yang Patuh dalam Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	83	Persen (%)
	Persentase penanganan pelanggaran ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	77	Persen (%)

Mengetahui, Desember 2025
Kepala Biro Pengawasan dan Penindakan
PBK,SRG dan PLK,



MATHEUS HENDRO PURNOMO

LAMPIRAN 2

FORMULIR APLIKASI KRISNA

BAPPENAS TAHUN 2026

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2. PROGRAM

:

EF - Program Perdagangan Dalam Negeri
3. SASARAN PROGRAM

:

09 - Meningkatkan Kinerja Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas yang tangguh dan berkelanjutan
4. KEGIATAN

:

3759 - Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

02 - Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan penindakan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas		525.000,0
01.01	Pelaku Usaha yang patuh dalam kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	83	
01.02	Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	77	
Total			525.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan penindakan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas										525.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga										0,0
01.BIC.001	Pengawasan Penyelenggara PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Pengawasan Pasar Lelang Komoditas										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Koordinasi dan Evaluasi Pasar Lelang Komoditas										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.BIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha										525.000,0
01.BIH.001	Pengawasan Pelaku Usaha PBK melalui Audit								000 - Bukan Tematik		272.830,0
	051 - Penyusunan Risk Based Audit Pelaku Usaha PBK (Offsite)										46.550,0
		Pusat	Pusat								46.550,0
	052 - Pelaksanaan Audit/Pengawasan Pelaku Usaha PBK (Onsite)										226.280,0
		Pusat	Pusat								226.280,0
01.BIH.002	Pengawasan Pelaku Usaha SRG								000 - Bukan Tematik		131.440,0
	051 - Pelaksanaan Pengawasan Lembaga dan Transaksi SRG										131.440,0
		Pusat	Pusat								131.440,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.BIH.003	Pengawasan Pelaku Usaha legal/Illegal melalui penindakan di Bidang PBK/SRG/PLK								000 - Bukan Tematik		120.730,0
	051 - Pemeriksaan terhadap Pelanggaran di bidang PBK, SRG, dan PLK										73.292,0
		Pusat	Pusat								73.292,0
	052 - Penyidikan terhadap Pelanggaran di bidang PBK dan SRG										19.464,0
		Pusat	Pusat								19.464,0
	053 - Pemeriksaan terhadap Entitas Ilegal di Bidang PBK, SRG, dan PLK										27.974,0
		Pusat	Pusat								27.974,0
01.CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										0,0
01.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Perangkat Pengawasan Gudang SRG di Daerah								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Pelaksanaan Mekanisasi Sistem Pengawasan pada Gudang (CCTV)										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Modernisasi CCTV pada Gudang SRG										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan										0,0
01.FAB.001	Sistem Informasi Pengawasan PBK								000 - Bukan Tematik		0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Integrasi Aplikasi Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.FAB.002	Sistem Informasi Pengawasan SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Pemeliharaan Aplikasi Penunjang Pengawasan SRG										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Penunjang Pengawasan PLK										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
Total											525.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan penindakan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas				525.000,0				0,0	0,0	0,0
01.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		Lembaga		0,0				0,0	0,0	0,0
01.BIC.001	Pengawasan Penyelenggara PLK	0	Lembaga		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BIC.001.051	Pengawasan Pasar Lelang Komoditas	0,0	Laporan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIC.001.052	Koordinasi dan Evaluasi Pasar Lelang Komoditas	0,0	Laporan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		Badan Usaha		525.000,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.BIH.001	Pengawasan Pelaku Usaha PBK melalui Audit	26	Badan Usaha		272.830,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BIH.001.051	Penyusunan Risk Based Audit Pelaku Usaha PBK (Offsite)	26,0	Laporan	1.790,4	46.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIH.001.052	Pelaksanaan Audit/Pengawasan Pelaku Usaha PBK (Onsite)	26,0	Perusahaan	8.703,1	226.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIH.002	Pengawasan Pelaku Usaha SRG	5	Badan Usaha		131.440,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BIH.002.051	Pelaksanaan Pengawasan Lembaga dan Transaksi SRG	5,0	Lembaga	26.288,0	131.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIH.003	Pengawasan Pelaku Usaha legal/Illegal melalui penindakan di Bidang PBK/SRG/PLK	4	Badan Usaha		120.730,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BIH.003.051	Pemeriksaan terhadap Pelanggaran di bidang PBK, SRG, dan PLK	2,0	Badan Usaha	36.646,0	73.292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIH.003.052	Penyidikan terhadap Pelanggaran di bidang PBK dan SRG	1,0	Badan Usaha	19.464,0	19.464,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIH.003.053	Pemeriksaan terhadap Entitas Ilegal di Bidang PBK, SRG, dan PLK	1,0	Badan Usaha	27.974,0	27.974,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		0,0				0,0	0,0	0,0
01.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Perangkat Pengawasan Gudang SRG di Daerah	0	Unit		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.001.051	Pelaksanaan Mekanisasi Sistem Pengawasan pada Gudang (CCTV)	0,0	Unit	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.001.052	Modernisasi CCTV pada Gudang SRG	0,0	Unit	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan		Sistem Informasi		0,0				0,0	0,0	0,0
01.FAB.001	Sistem Informasi Pengawasan PBK	0	Sistem Informasi		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.FAB.001.051	Integrasi Aplikasi Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi	0,0	Paket	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB.002	Sistem Informasi Pengawasan SRG dan PLK	0	Sistem Informasi		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.FAB.002.051	Pemeliharaan Aplikasi Penunjang Pengawasan SRG	0,0	Paket	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.FAB.002.052	Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Penunjang Pengawasan PLK	0,0	Paket	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					525.000,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan penindakan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas		525.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525.000,0
01.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIC.001	Pengawasan Penyelenggara PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIC.001.051	Pengawasan Pasar Lelang Komoditas	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIC.001.052	Koordinasi dan Evaluasi Pasar Lelang Komoditas	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		525.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525.000,0
01.BIH.001	Pengawasan Pelaku Usaha PBK melalui Audit		272.830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272.830,0
01.BIH.001.051	Penyusunan Risk Based Audit Pelaku Usaha PBK (Offsite)	Utama	46.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.550,0
01.BIH.001.052	Pelaksanaan Audit/Pengawasan Pelaku Usaha PBK (Onsite)	Utama	226.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226.280,0
01.BIH.002	Pengawasan Pelaku Usaha SRG		131.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131.440,0
01.BIH.002.051	Pelaksanaan Pengawasan Lembaga dan Transaksi SRG	Utama	131.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131.440,0
01.BIH.002.052	Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Sistem Resi Gudang	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIH.003	Pengawasan Pelaku Usaha legal/Illegal melalui penindakan di Bidang PBK/SRG/PLK		120.730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120.730,0
01.BIH.003.051	Pemeriksaan terhadap Pelanggaran di bidang PBK, SRG, dan PLK	Utama	73.292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73.292,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.BIH.003.052	Penyidikan terhadap Pelanggaran di bidang PBK dan SRG	Utama	19.464,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.464,0
01.BIH.003.053	Pemeriksaan terhadap Entitas Ilegal di Bidang PBK, SRG, dan PLK	Utama	27.974,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.974,0
01.CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Perangkat Pengawasan Gudang SRG di Daerah		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.001.051	Pelaksanaan Mekanisasi Sistem Pengawasan pada Gudang (CCTV)	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.001.052	Modernisasi CCTV pada Gudang SRG	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB.001	Sistem Informasi Pengawasan PBK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB.001.051	Integrasi Aplikasi Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB.002	Sistem Informasi Pengawasan SRG dan PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB.002.051	Pemeliharaan Aplikasi Penunjang Pengawasan SRG	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB.002.052	Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Penunjang Pengawasan PLK	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total			525.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525.000,0

Jakarta, Desember 2025

Kepala Biro Pengawasan dan
Penindakan PBK,SRG dan PLK,


MATHEUS HENDRO PURNOMO

i

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2. PROGRAM : EF - Program Perdagangan Dalam Negeri
3. SASARAN PROGRAM : 09 - Meningkatnya Kinerja Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas yang tangguh dan berkelanjutan
4. KEGIATAN : 3759 - Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 02 - Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan penindakan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas		525.000,0
01.01	Pelaku Usaha yang patuh dalam kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	83	
01.02	Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	77	
Total			525.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan penindakan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas										525.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga										0,0
01.BIC.001	Pengawasan Penyelenggara PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Pengawasan Pasar Lelang Komoditas										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Koordinasi dan Evaluasi Pasar Lelang Komoditas										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.BIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha										525.000,0
01.BIH.001	Pengawasan Pelaku Usaha PBK melalui Audit								000 - Bukan Tematik		272.830,0
	051 - Penyusunan Risk Based Audit Pelaku Usaha PBK (Offsite)										46.550,0
		Pusat	Pusat								46.550,0
	052 - Pelaksanaan Audit/Pengawasan Pelaku Usaha PBK (Onsite)										226.280,0
		Pusat	Pusat								226.280,0
01.BIH.002	Pengawasan Pelaku Usaha SRG								000 - Bukan Tematik		131.440,0
	051 - Pelaksanaan Pengawasan Lembaga dan Transaksi SRG										131.440,0
		Pusat	Pusat								131.440,0
01.BIH.003	Pengawasan Pelaku Usaha legal/Illegal melalui penindakan di Bidang PBK/SRG/PLK								000 - Bukan Tematik		120.730,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Pemeriksaan terhadap Pelanggaran di bidang PBK, SRG, dan PLK										73.292,0
		Pusat	Pusat								73.292,0
	052 - Penyidikan terhadap Pelanggaran di bidang PBK dan SRG										19.464,0
		Pusat	Pusat								19.464,0
	053 - Pemeriksaan terhadap Entitas Ilegal di Bidang PBK, SRG, dan PLK										27.974,0
		Pusat	Pusat								27.974,0
01.CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										0,0
01.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Perangkat Pengawasan Gudang SRG di Daerah								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Pelaksanaan Mekanisasi Sistem Pengawasan pada Gudang (CCTV)										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Modernisasi CCTV pada Gudang SRG										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan										0,0
01.FAB.001	Sistem Informasi Pengawasan PBK								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Integrasi Aplikasi Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.FAB.002	Sistem Informasi Pengawasan SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Pemeliharaan Aplikasi Penunjang Pengawasan SRG										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Penunjang Pengawasan PLK										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
Total											525.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan penindakan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas				525.000,0				0,0	0,0	0,0
01.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		Lembaga		0,0				0,0	0,0	0,0
01.BIC.001	Pengawasan Penyelenggara PLK	0	Lembaga		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BIC.001.051	Pengawasan Pasar Lelang Komoditas	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIC.001.052	Koordinasi dan Evaluasi Pasar Lelang Komoditas	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		Badan Usaha		525.000,0				0,0	0,0	0,0
01.BIH.001	Pengawasan Pelaku Usaha PBK melalui Audit	26	Badan Usaha		272.830,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BIH.001.051	Penyusunan Risk Based Audit Pelaku Usaha PBK (Offsite)	26,0	Laporan	1.790,4	46.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIH.001.052	Pelaksanaan Audit/Pengawasan Pelaku Usaha PBK (Onsite)	26,0	Perusahaan	8.703,1	226.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIH.002	Pengawasan Pelaku Usaha SRG	5	Badan Usaha		131.440,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.BIH.002.051	Pelaksanaan Pengawasan Lembaga dan Transaksi SRG	5,0	Lembaga	26.288,0	131.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIH.003	Pengawasan Pelaku Usaha legal/Illegal melalui penindakan di Bidang PBK/SRG/PLK	4	Badan Usaha		120.730,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BIH.003.051	Pemeriksaan terhadap Pelanggaran di bidang PBK, SRG, dan PLK	2,0	Badan Usaha	36.646,0	73.292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIH.003.052	Penyidikan terhadap Pelanggaran di bidang PBK dan SRG	1,0	Badan Usaha	19.464,0	19.464,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIH.003.053	Pemeriksaan terhadap Entitas Ilegal di Bidang PBK, SRG, dan PLK	1,0	Badan Usaha	27.974,0	27.974,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		0,0				0,0	0,0	0,0
01.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Perangkat Pengawasan Gudang SRG di Daerah	0	Unit		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.001.051	Pelaksanaan Mekanisasi Sistem Pengawasan pada Gudang (CCTV)	0,0	Unit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.001.052	Modernisasi CCTV pada Gudang SRG	0,0	Unit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan		Sistem Informasi		0,0				0,0	0,0	0,0
01.FAB.001	Sistem Informasi Pengawasan PBK	0	Sistem Informasi		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.FAB.001.051	Integrasi Aplikasi Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi	0,0	Paket	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB.002	Sistem Informasi Pengawasan SRG dan PLK	0	Sistem Informasi		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.FAB.002.051	Pemeliharaan Aplikasi Penunjang Pengawasan SRG	0,0	Paket	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB.002.052	Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Penunjang Pengawasan PLK	0,0	Paket	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					525.000,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan penindakan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas		525.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525.000,0
01.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIC.001	Pengawasan Penyelenggara PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIC.001.051	Pengawasan Pasar Lelang Komoditas	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIC.001.052	Koordinasi dan Evaluasi Pasar Lelang Komoditas	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		525.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525.000,0
01.BIH.001	Pengawasan Pelaku Usaha PBK melalui Audit		272.830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272.830,0
01.BIH.001.051	Penyusunan Risk Based Audit Pelaku Usaha PBK (Offsite)	Utama	46.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.550,0
01.BIH.001.052	Pelaksanaan Audit/Pengawasan Pelaku Usaha PBK (Onsite)	Utama	226.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226.280,0
01.BIH.002	Pengawasan Pelaku Usaha SRG		131.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131.440,0
01.BIH.002.051	Pelaksanaan Pengawasan Lembaga dan Transaksi SRG	Utama	131.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131.440,0
01.BIH.002.052	Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Sistem Resi Gudang	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIH.003	Pengawasan Pelaku Usaha legal/Illegal melalui penindakan di Bidang PBK/SRG/PLK		120.730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120.730,0
01.BIH.003.051	Pemeriksaan terhadap Pelanggaran di bidang PBK, SRG, dan PLK	Utama	73.292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73.292,0
01.BIH.003.052	Penyidikan terhadap Pelanggaran di bidang PBK dan SRG	Utama	19.464,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.464,0
01.BIH.003.053	Pemeriksaan terhadap Entitas Ilegal di Bidang PBK, SRG, dan PLK	Utama	27.974,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.974,0
01.CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Perangkat Pengawasan Gudang SRG di Daerah		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.001.051	Pelaksanaan Mekanisasi Sistem Pengawasan pada Gudang (CCTV)	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.001.052	Modernisasi CCTV pada Gudang SRG	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.FAB.001	Sistem Informasi Pengawasan PBK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB.001.051	Integrasi Aplikasi Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB.002	Sistem Informasi Pengawasan SRG dan PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB.002.051	Pemeliharaan Aplikasi Penunjang Pengawasan SRG	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB.002.052	Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Penunjang Pengawasan PLK	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total			525.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525.000,0

Jakarta, Desember 2025

Kepala Biro Pengawasan dan

Penindakan PBK,SRG dan PLK,



MATHEUS HENDRO PURNOMO

i